

Notulensi Policy Talks

“Arah Ekonomi Indonesia di Era Baru Bank Indonesia”

Tempat	Zoom Meeting
Hari / Tanggal	Kamis, 17 September 2026
Waktu	14.00-15.00
Narasumber	1. Putu Rusta Adijaya, Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute 2. Gede Sandra, Direktur Eksekutif Infast Bestari
Penyelenggara	The Indonesian Institute
Peserta	<i>Online</i>

Ringkasan

Pada Kamis, 17 September 2026, The Indonesian Institute (TII) menyelenggarakan kegiatan *Policy Talks* yang menghadirkan Putu Rusta Adijaya, Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, bersama Bapak Gede Sandra, Direktur Eksekutif Infast Bestari, sebagai pembicara. Diskusi membahas sejumlah isu terkait kondisi dan prospek perekonomian Indonesia, khususnya mengenai ruang untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan akses pengetahuan ekonomi dan finansial, penguatan peran pemerintah daerah, serta optimalisasi peran lembaga-lembaga ekonomi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembahasan awal, diskusi menyoroti pentingnya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam merespons berbagai tantangan pembangunan ekonomi. Setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, serta persoalan yang berbeda sehingga diperlukan pemahaman yang memadai mengenai pilihan kebijakan yang dapat diterapkan sesuai dengan konteks masing-masing daerah. Dalam konteks tersebut, disampaikan gagasan mengenai pembentukan tim percepatan yang dapat berfungsi sebagai sarana pertukaran praktik baik antardaerah sekaligus memberikan pendampingan kepada kepala daerah yang masih membutuhkan pemahaman mengenai langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayahnya.

Keberadaan mekanisme pertukaran pengetahuan tersebut dinilai penting karena kapasitas pemerintah daerah dalam memahami dan menerjemahkan kebijakan ekonomi ke dalam program konkret tidak selalu merata. Dengan adanya ruang untuk berbagi pengalaman dan praktik baik, pemerintah daerah dapat mempelajari pendekatan yang telah diterapkan di

wilayah lain, sekaligus menyesuaikannya dengan kondisi lokal. Pendekatan ini juga dapat membantu mengurangi kesenjangan pengetahuan antardaerah dan mendorong proses pengambilan kebijakan yang lebih berbasis pada pembelajaran.

Pembahasan kemudian berkembang pada persoalan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam sesi tanya jawab, Gede Sandra dan Putu Rusta sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih memiliki ruang yang cukup besar untuk diakselerasi. Menurut pembahasan dalam diskusi, upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan indikator makroekonomi, tetapi juga perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang tersedia.

Salah satu aspek yang mendapat perhatian adalah pemerataan pengetahuan mengenai ekonomi dan keuangan. Literasi finansial dipandang tidak seharusnya hanya menjadi pengetahuan yang dapat diakses oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan atau pendapatan tertentu. Sebaliknya, pemahaman mengenai konsep-konsep dasar ekonomi dan keuangan perlu diperluas kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan paling rendah.

Gede Sandra menekankan pentingnya membekali masyarakat dengan kemampuan untuk memahami berbagai kondisi ekonomi yang secara langsung memengaruhi kehidupan mereka. Salah satu contoh yang disampaikan adalah kemampuan masyarakat untuk mengenali dan memahami tingkat suku bunga yang masih berada dalam batas wajar dan rasional. Pemahaman tersebut menjadi penting karena keputusan masyarakat dalam mengakses kredit atau pembiayaan dapat memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kondisi keuangan rumah tangga.

Lebih lanjut, menurut Gede Sandra, pemahaman mengenai dasar-dasar ekonomi tidak semestinya hanya diberikan kepada individu yang mengambil pendidikan atau memiliki latar belakang ekonomi. Pengetahuan ekonomi dasar perlu menjadi bagian dari literasi masyarakat secara umum. Dalam hal ini, Bank Indonesia dinilai memiliki peran strategis untuk membantu memperkenalkan konsep-konsep dasar ekonomi kepada masyarakat secara lebih luas. Penguatan pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat membuat keputusan ekonomi dan finansial secara lebih sadar serta memahami berbagai perubahan yang terjadi dalam perekonomian.

Kebutuhan terhadap literasi finansial yang lebih inklusif juga dikaitkan dengan berbagai persoalan sosial-ekonomi yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah

meningkatnya risiko yang ditimbulkan oleh perjudian daring atau *judol*, serta praktik pinjaman melalui rentenir. Kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih rentan dapat menghadapi konsekuensi yang lebih berat ketika mengambil keputusan finansial tanpa memiliki informasi dan pemahaman yang memadai. Oleh karena itu, penguatan literasi finansial tidak hanya dipandang sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap kelompok yang rentan terhadap berbagai praktik ekonomi yang dapat memperburuk kondisi kesejahteraan mereka.

Dalam konteks perjudian daring, Putu Rusta menambahkan bahwa pendekatan kebijakan tidak cukup hanya berfokus pada aspek literasi dan pencegahan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan aspek pemulihan psikologis bagi individu yang telah terlibat atau terdampak perjudian daring. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan *judol* tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengelola keuangan, tetapi juga dapat memiliki dimensi sosial dan psikologis yang membutuhkan intervensi lebih komprehensif.

Selain pemulihan, Putu Rusta juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga untuk mengidentifikasi individu yang memiliki risiko kerentanan finansial. Dalam hal ini, Bank Indonesia perlu berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan. Koordinasi lintas lembaga tersebut diperlukan agar kebijakan terkait stabilitas dan perlindungan sektor keuangan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi. Dengan adanya pertukaran informasi dan koordinasi yang lebih baik, berbagai risiko yang dihadapi masyarakat diharapkan dapat dideteksi lebih awal dan ditangani melalui kebijakan yang sesuai.

Isu pemerataan ekonomi juga menjadi salah satu perhatian dalam diskusi. Putu Rusta menyampaikan harapan agar di bawah kepemimpinan baru Bank Indonesia, peningkatan akses kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat terus didorong. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian dan perlu memperoleh akses pembiayaan yang memadai agar dapat mempertahankan maupun mengembangkan kegiatan usahanya. Dalam konteks pemerataan ekonomi, perluasan akses terhadap kredit dapat menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bahwa kesempatan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok atau pelaku usaha dengan kapasitas finansial yang sudah kuat.

Peningkatan akses kredit tersebut juga berkaitan dengan bagaimana lembaga keuangan dan kebijakan moneter dapat menjangkau kelompok masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal. Dengan demikian, pembahasan mengenai kredit tidak hanya berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang tersedia,

tetapi juga mengenai siapa yang memperoleh akses terhadap pembiayaan tersebut, dengan persyaratan seperti apa, serta bagaimana pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.

Pada bagian akhir diskusi, Gede Sandra menekankan pentingnya transformasi peran Bank Indonesia dalam konteks perkembangan ekonomi Indonesia. Menurutnya, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam sistem perekonomian, terutama melalui kewenangannya dalam menjaga stabilitas moneter, mengatur kebijakan terkait suku bunga, serta memengaruhi kondisi dan alokasi kredit dalam perekonomian. Karena itu, peran strategis tersebut diharapkan dapat diarahkan untuk mendukung kebijakan ekonomi yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Gede Sandra juga menekankan bahwa Bank Indonesia di era baru perlu mentransformasikan kelembagaan ekonomi agar semakin berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dalam perspektif tersebut, bank sentral tidak hanya dipandang dari fungsi menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga dari bagaimana instrumen dan kebijakan yang berada dalam ruang kewenangannya dapat mendukung pemerataan kesempatan ekonomi. Alokasi kredit kepada kelompok yang memiliki kebutuhan dan potensi ekonomi, serta pengelolaan suku bunga yang mempertimbangkan kondisi perekonomian, menjadi bagian penting dari pembahasan tersebut.

Secara keseluruhan, diskusi *Policy Talks* menunjukkan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu berjalan beriringan dengan agenda pemerataan pengetahuan, perluasan akses terhadap sumber pembiayaan, serta penguatan perlindungan masyarakat dari risiko finansial. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya perlu dilihat dari peningkatan indikator makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk memahami, mengakses, dan memperoleh manfaat dari berbagai aktivitas ekonomi.

Diskusi juga menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan yang melibatkan berbagai aktor dan lembaga. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan pengetahuan dan pertukaran praktik baik, masyarakat membutuhkan literasi ekonomi dan finansial yang lebih inklusif, sementara lembaga seperti Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan perlu memperkuat koordinasi dalam merespons berbagai risiko ekonomi dan finansial. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, kebijakan ekonomi diharapkan tidak hanya mampu menjaga stabilitas, tetapi juga memperluas kesempatan ekonomi dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.